

PERIZINAN BERUSAHA
2023

PERDA KAB. PANGANDARAN NO.1, LD 2023/ NO. 1, 24 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

- ABSTRAK : - Untuk pelayanan perizinan berusaha yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi diperlukan dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha dan upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan berusaha maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2023 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Diatur kewenangan Bupati dalam memberikan izin, sistem perizinan berbasis risiko, dan persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Dinas Penanaman Modal dan PTSP bertanggung jawab atas pelayanan perizinan yang tidak dipungut biaya, dengan ketentuan retribusi untuk izin tertentu. Peraturan ini menekankan pentingnya pengawasan, pembinaan, dan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan pelaporan yang transparan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 20 Februari 2023.
- Jumlah Penjelasan 3 halaman.